



Pranatan Anyar



BANYAK KELUARGA YANG MEMPERTANYAKAN

Santunan Kematian Pasien Covid-19 Distop

KARANGANYAR (KR) - Sebanyak 119 usulan santunan kematian pasien Covid-19 Kabupaten Karanganyar, tak bisa diproses. Pemerintah telah menghentikan program tersebut.

Kabid Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Dinas Sosial Karanganyar Gunarto menginformasikan, program santunan kematian pasien Covid-19 tak lagi didanai APBN.

"Sebelumnya memang ada program seperti itu pada 2020 lalu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kemensos melalui Dinsos Provinsi Jawa Tengah memberitahukan program itu distop oleh Pemerintah Pusat. Padahal dari daerah sudah telanjur mengusulkannya," katanya, Minggu (28/2).

Dikatakan, Dinsos Karanganyar telah mengajukan 119 berkas usulan dari ahli waris. Perangkat peng-

usulannya antara lain surat kematian yang menerangkan penyebabnya terinfeksi Covid-19, kemudian dokumentasi pemulasaran jenazah sesuai protokol kesehatan oleh petugas khusus.

"Kami berani memproses usulan itu karena sebelumnya mendapat Surat Edaran yang menerangkan masyarakat dapat mengajukan santunan jika kematian disebabkan terpapar Covid-19. Karena itu kami berani merekap lalu menyampaikannya ke Dinsos Jateng agar memperoleh rekomendasi ke Kemensos," katanya.

Dari 119 usulan itu, belum satu

pun disetujui Pemerintah Pusat. Ternyata, program itu sudah dihentikan. Pihaknya pun menerima tembusan surat mengenai hal itu belum lama ini.

"Akhirnya kami harus memberitahukan ke ahli waris bahwa usulannya ditolak. Padahal sudah banyak keluarga yang menanyakan kapan santunan cair," katanya.

Setahu dirinya, Dinsos Jateng telah memberikan rekomendasi ke Kemensos perihal 2.174 usulan santunan kematian.

Di luar itu masih terdapat 1.100-an usulan belum sempat diberi rekomendasi meski sudah diterima berkasnya.

"Baru tujuh santunan kematian yang disetujui di Jateng. Dari Surat Edaran yang saya ketahui, penerima santunan berhak mendapatkan Rp 15 juta," katanya. **(Lim)-f**



Pemulasaran jenazah pasien Covid-19.

KR-Abdul Alim

SEMINGGU PASCAPERPANJANGAN PPKM MIKRO Meski Menurun, Masih Terjadi 125 Pelanggaran

YOGYA (KR) - Meski perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di DIY sudah dilakukan seminggu, ternyata masih ditemukan banyak pelanggaran di masyarakat. Mayoritas pelanggaran itu terkait pemakaian masker atau penegakan protokol kesehatan (prokes).

"Memang jika dibandingkan pelaksanaan PPKM Mikro sebelumnya jumlah pelanggaran mengalami penurunan cukup banyak. Meski begitu satu minggu setelah perpanjangan PPKM masih ditemukan 125 pelanggaran. Mayoritas soal pemakaian masker dan prokes," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, Minggu (28/2).

Noviar mengatakan, meski pelanggaran menurun, penegakan prokes dan pengawasan terus dilakukan Satpol PP DIY didukung TNI-Polri. Selain melakukan sosialisasi dan edukasi, Satpol PP DIY terus berupaya agar poin-poin dalam PPKM bisa dilaksanakan sebaik-baiknya.

Termasuk soal pembentukan Satgas Covid-19 Tingkat RT/RW dan Dusun. Karena hanya dengan cara tersebut tujuan dari PPKM untuk menekan penularan kasus secara signifikan bisa dilaksanakan.

Sementara itu tingkat kesembuhan Covid-19 di Kabupaten Kulonprogo cukup bagus, sehingga kasus aktif tinggal 12,4 persen, dengan angka kematian 1,89 persen, sedangkan angka kesembuhan 87,96 persen bahkan lebih tinggi dari DIY maupun nasional.

"Situasi paling banyak kasus di bulan Januari, namun isolasi sekitar 14 hari sehingga banyak yang sudah sembuh," kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo Banning Rahayujati.

Banning menyampaikan, pekan kemarin pihaknya melakukan validasi data terhadap penderita yang selesai isolasi, sehingga memang ada peningkatan selesai isolasi cukup tinggi. Ada yang memang belum dilaporkan ke Dinas Kesehatan, sehingga banyak warga yang telah selesai isolasi tapi belum dilaporkan.

"Hanya saja kapasitas rumah sakit cukup lemah, karena *bed occupancy rate* (BOR) atau tingkat hunian pasien masih 100 persen, sedangkan standar nasional 70 persen. Meski kasus secara umum di Kulonprogo menurun, tetapi kapasitas rumah sakit cukup sulit untuk bisa melayani penderita-penderita di rumah sakit," jelas Banning. **(Ria/Ira/Wid)-d**

Masyarakat Jangan Takut Divaksin

TEMANGGUNG (KR) - Vaksinasi sebagai salah satu langkah untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Karena itu masyarakat tidak usah takut menjalaninya, dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Jangan takut divaksin. Ini untuk menanggulangi pandemi yang masih terjadi. Seluruh masyarakat nanti ketika sudah tiba saatnya untuk semuanya bisa melaksanakan vaksinasi Covid-19," kata Bupati Temanggung Al Khadziq, Minggu (28/2).

Khadziq mengatakan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (For-kompinda), tenaga medis, tokoh agama dan masyarakat telah menjalani vaksinasi. Demikian halnya

dengan wartawan dan relawan. Setelah itu meluas pada masyarakat secara umum.

Dikemukakan, usai divaksin, tubuhnya tidak menunjukkan dampak negatif baik pada dosis pertama maupun dosis kedua. Tubuh justru terasa sehat dan percaya diri. "Saya sudah tuntas menjalani vaksinasi Covid-19, Alhamdulillah tidak ada pengaruh negatif dalam tubuh saya, semua berjalan dengan lancar dan baik-baik saja," katanya.

Dikatakan Bupati Temanggung pentingnya penerapan prokes dalam kehidupan sehari-hari secara ketat meski semua warga ke depan telah divaksin. Vaksinasi sebagai langkah untuk menciptakan *herd immunity* atau kekebalan komuni-

tas.

"Dengan divaksin, daya tahan tubuh menjadi lebih baik lagi. Meskipun begitu tetap harus menjaga dan menjalankan protokol kesehatan agar semua terhindar dari Covid-19," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto juga minta pada seluruh masyarakat untuk tidak usah takut divaksin, demi kebaikan bersama. Dirinya juga sudah menjalankan vaksinasi kedua dan tidak ada permasalahan negatif.

"Kami mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Temanggung jangan takut, mari semua harus vaksin untuk imunitas supaya aman dari Covid-19," katanya. **(Osy)-f**



KR-Antara/Eka AR

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan keterangan usai mencoba KRL Yogyakarta-Solo di Stasiun Tugu Yogyakarta, Minggu (28/2).

LAYANAN KRL YOGYA-SOLO

Diteruskan ke Kutoarjo dan Madiun

YOGYA (KR) - Jangkauan layanan moda transportasi massal Kereta Rel Listrik (KRL) Yogyakarta-Solo akan terus ditingkatkan, salah satunya memperpanjang rute layanan ke arah Barat yaitu hingga Kutoarjo, Jawa Tengah dan ke arah Timur yaitu hingga Madiun, Jawa Timur.

"KRL adalah masa depan angkutan massal dan layanan pun harus selalu ditingkatkan. Ke depan, rute akan diperpanjang hingga Kutoarjo di sisi Barat dan ke arah Timur hingga Madiun," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Stasiun Tugu Yogyakarta, Minggu (28/2).

Saat jangkauan layanan diperpanjang, lanjut Budi, maka bisa dibayangkan jika mobilitas masyarakat antarkota akan semakin meningkat karena layanan transportasi bisa dijangkau dengan lebih mudah.

"Masyarakat yang tinggal di Madiun bisa bekerja di Yogyakarta atau sebaliknya. Bisa pulang pergi bekerja dengan mudah dan cepat dalam sehari," katanya.

KRL Yogyakarta-Solo resmi beroperasi secara penuh mulai 10 Februari 2021 dengan layanan 22 perjalanan pulang pergi setiap hari yang melintasi 11 stasiun dengan waktu tempuh 68 menit atau lebih cepat dibanding waktu tempuh KA Prambanan Ekspres (Prames) 72 menit dengan berhenti di tujuh stasiun.

Menhub pun mencoba moda transportasi tersebut dari Solo menuju Stasiun Tugu Yogyakarta dan menyebut angkutan massal tersebut cukup nyaman. "Moda transportasi ini berjalan dengan sangat tenang, hampir

tidak ada guncangan. Masyarakat pun menyambut gembira layanan ini karena jumlah penumpang semakin bertambah," katanya.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan KRL Yogyakarta-Solo di Stasiun Tugu, Senin (1/3) hari ini. "Kami sangat senang karena KRL pertama yang dioperasionalkan di luar Jobodetabek ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo," katanya.

Keberadaan layanan transportasi massal tersebut, lanjut Budi, juga menjadi bukti kehadiran negara untuk masyarakat yaitu menyediakan fasilitas transportasi publik dengan pelayanan yang baik.

Harapannya, kata Menhub, kereta api bisa menjadi andalan masyarakat untuk mendukung aktivitas mereka sehari-hari baik aktivitas perjalanan antarkota maupun aktivitas menuju fasilitas lain seperti bandara. **(Ant)-f**

Dikembangkan, Lumbung Pangan Berkelanjutan

JAKARTA (KR) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan atau *food estate* berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, Food and Agriculture Organization (FAO) telah mengeluarkan peringatan akan terjadinya krisis pangan akibat pandemi Covid-19.

"Untuk menghadapi tantangan ini, Kementerian PUPR melaksanakan pengembangan dan pengelolaan *food estate* berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19," ujar Menteri PUPR dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/2).

Di tengah pandemi Covid-19, Kementerian PUPR terus berupaya mencapai target pembangunan infrastruktur guna membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui peningkatan belanja negara. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama masa pandemi adalah pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan (*food estate*).

Saat ini Kementerian PUPR tengah mengembangkan *food estate* seluas 165.000 hektare di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Provinsi

Kalimantan Tengah. Di samping itu, telah diprogramkan kegiatan pengembangan *food estate* di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Basuki mengatakan, *food estate* merupakan arahan Presiden sebagai prioritas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui ketahanan pangan nasional.

Dalam pengembangannya, tentu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Secara garis besar tantangan tersebut meliputi tata kelola air, ekonomi masyarakat, lingkungan, kelembagaan dan pembiayaan.

"Di masing-masing lokasi pengembangan *food estate* pasti memiliki karakter dan tantangan yang berbeda-beda. Di Kalimantan Tengah kita revitalisasi lahan eks-PLG yang bukan lahan gambut, tetapi alluvial seluas 165.000 ha. Itu semua butuh tata kelola air yang sangat detail dan akurat. Di sini kita prioritaskan penanganan drainasenya sehingga lahan tidak tergenang dan bisa ditanami," kata Menteri PUPR.

Sementara, di Sumatera Utara dan NTT yang merupakan lahan kering difokuskan ke irigasinya menggunakan *gun sprinkler*. Dibutuhkan pemikiran dan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapat solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan di lapangan. **(Ant)-f**

KEMBALI TERJADI AWAN PANAS 25 Kali Guguran Lava Pijar

YOGYA (KR) - Gunung Merapi mengeluarkan 25 kali guguran lava pijar, Minggu (28/2) pukul 00.00-06.00 WIB, dengan jarak luncur maksimal 1.000 meter ke arah barat daya. Pada periode tersebut, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) juga mencatat terjadi 31 kali gempa guguran dan 6 kali gempa hembusan.

Dari pemantauan BPPTKG, cuaca di puncak Merapi cerah, berawan, dan mendung. Angin bertiup sedang ke arah timur. Suhu udara 13-22 celcius, kelembaban udara 66-67 %, dan tekanan udara 835-924 mmHg. Dari pengamatan visual gunung jelas hingga kabut 0-I. Asap kawah tidak teramati.

Sedangkan pada periode pemantauan sehari sebelumnya, Sabtu (27/2), pukul 00.00-24.00 WIB, Gunung Merapi tercatat mengeluarkan 1 kali awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 1.000 meter ke arah barat daya. Selain itu teramati terjadi 45 kali guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimum 1.000 meter ke arah barat daya.

Kepala BPPTKG Hanik Humaida dalam keterangan resminya, Minggu (28/2) mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental maka disimpulkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif.

Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Selatan-Barat Daya meliputi sungai Boyong, Bedog, Krasak, Bebung, dan Putih sejauh maksimal 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi ledakan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. **(Dev)-f**

KEMENDIKBUD PERKUAT D4 Cetak Kreator dan Inovator

JAKARTA (KR) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperkuat Program Pendidikan Sarjana Terapan atau D4 agar lulusannya tidak hanya terampil dalam bidang yang dipelajari, tetapi juga mampu menjadi pemimpin, kreator, dan inovator.

"Setelah mendapatkan pengetahuan dan keahlian teknikal di jenjang Pendidikan D3, Pendidikan Sarjana Terapan atau D4 sebagai jawaban atas kebutuhan industri akan melatih peserta didik mengembangkan karakter adaptif, kreatif, dan cerdas," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (28/2).

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto, Program Pendidikan D4 meliputi 60 persen praktik dan 40 persen teori sehingga lulusannya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan industri saat ini.

Ditambahkan, lulusan Program Pendidikan D4 punya keahlian lebih dibandingkan dengan lulusan Program Pendidikan D3 karena telah mengikuti program pembelajaran berbasis proyek bersama dengan industri serta magang selama satu tahun di industri.

Wikan juga menjelaskan mengenai upaya pengembangan Pendidikan Vokasi melalui penerapan Program SMK-D2 Fast Track. "Jadi nantinya SMK ditambahi tiga semester magang, sistemnya nanti *dual system*, yaitu mereka dapat kuliah sambil magang. Sistem ini juga digunakan oleh Jerman," katanya.

Menurutnya, perkembangan pesat industri membuat beberapa pekerjaan mulai menghilang dan pekerjaan-pekerjaan baru muncul. **(Ant)-f**